



Data Tak Valid

Lambat, Realisasi Pencairan Dana TPG

Singaraja (Bali Post) -

Kebijakan pemerintah memberikan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) tampaknya belum dinikmati guru pengawas sekolah. Buktinya, memasuki pertengahan tahun anggaran 2015 ini, realisasi pencairan dana TPG baru 13 persen dari total anggaran, yang lebih dari Rp 236 miliar. Rendahnya persentase pencairan dana TPG ini karena berkas yang tidak valid setelah dicocokkan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Menyusul situasi ini, lembaga dewan di Buleleng mulai mempertanyakan rendahnya persentase pencairan dana TPG. Bahkan, Komisi I DPRD Buleleng beberapa waktu lalu memanggil Disdik Buleleng. Dalam rapat tersebut, dewan meminta penjelasan faktor pemicu rendahnya pencairan dana pusat tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyana, dalam rapat itu mengungkapkan, belakangan ini, pihaknya banyak mendapat pengaduan atau laporan dari guru maupun guru pengawas terkait tersendatnya pencairan dana TPG tahun 2015 ini. Dari dokumen yang dipegangnya itu, memasuki pertengahan tahun anggaran ini, dana TPG yang terealisasi 13 persen.

Persentase pencairan ini diakuinya masih sangat rendah. Kalau dibiarkan, dirinya khawatir akan memicu persoalan serius. Apalagi, prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih pertama kalinya itu akan terdampak, bila masalah itu tidak dicarikan jalan keluarnya. "Pencairannya baru 13 persen dan kami mempertanyakan bukan ingin mencari kesalahan SKPD. Namun, bagaimana kami ingin dana yang sudah disiapkan pemerintah pusat itu bisa tere-

alisasi dengan baik, sehingga jangan sampai persoalan ini dapat mengganggu kinerja guru maupun guru pengawas di daerah kita," katanya.

Dana TPG Rp 236 M

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Dra. Wayan Lugheni didampingi Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Manusia (SDM) Ketut Susi Maryanti, mengatakan, tahun anggaran 2015 ini, Buleleng menerima dana TPG lebih dari Rp 236 miliar. Anggaran sebesar ini dialokasikan untuk guru dan guru pengawas sekolah tingkat SMA/SMK dan Pendidikan Dasar (Dikdas). Dana TPG untuk guru SMA/SMK diusulkan melalui Disdik Buleleng. Sementara jenjang Dikdas pengusulannya dilakukan masing-masing guru yang telah dinyatakan lolos sertifikasi. Untuk guru SMA/SMK dari jumlah guru 949 orang hingga saat ini 892 orang telah menerima dana TPG. Dengan demikian, masih ada 57 guru di jenjang ini belum mendapatkan TPG. Pencairan anggaran triwulan pertama (Januari-Maret) dengan dana TPG yang sudah cair senilai Rp 46.741.021.000 untuk 4.201 orang. Sementara untuk triwulan dua, dana TPG yang sudah dibayarkan Rp 26.676.713.000. Guru penerimanya sebanyak

2.444 orang. Tidak hanya jenjang SMA/SMK, situasi yang sama, juga terjadi pada jenjang Dikdas. Dari jumlah penerima TPG sebanyak 3.375 orang, tercatat 136 orang guru gagal mendapatkan TPG semester pertama (Januari-Juni). "Untuk jenjang SMA/ SMK total dana yang sudah kita bayarkan Rp 73.417.734.600. Untuk jenjang Dikdas dana TPG-nya diusulkan langsung oleh guru bersangkutan," tegasnya.

Selama pengusulan dana TPG ini, pihaknya mengacu kalau masih ada berkas dengan data tak valid diajukan. Hal itu diketahui setelah dimasukkan pada sistem Dapodik Kemendikbud RI. Munculnya data tak valid itu akibat tidak lengkapnya syarat yang harus dipenuhi guru yang bersangkutan. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi, banyak guru yang tidak mampu mengajar minimal 24 jam seminggu. Seharusnya, guru menyetor surat keputusan kepala sekolah, faktanya guru menyetor surat pernyataan. Karena syarat yang tidak lengkap itu mengakibatkan Dapodik mengeluarkan kalau data tersebut tidak valid, akibatnya Surat Keputusan (SK) TPG-nya tidak bisa terbit," ujar Lugheni. (kmb38)

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 11



Pertama Kalinya Massa ForBALI Ditemui Dewan Reklamasi Langgar Ripparnas dan UU Pariwisata



Bali Post/eka

AKSI - Para pemuda, aktivis, akademisi, seniman dan krama Bali menggelar aksi simpatik menolak reklamasi Teluk Benoa di Denpasar, Rabu (19/8) kemarin.

"Beberapa hal yang dilanggar dalam reklamasi Teluk Benoa adalah PP No.50 Tahun 2011 tentang Ripparnas dan juga Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Iming-iming 250.000 tenaga kerja yang ditawarkan investor justru akan menimbulkan ketimpangan sosial di Bali. Pasalnya, Gubernur Bali dalam laporan pertanggungjawaban pada 2014 menyebut jumlah pengangguran di Pulau Dewata hanya 44 ribu orang."

A.A. Ngurah Adhi Ardhana
Anggota Komisi II DPRD Bali

"Investor yang baik adalah investor yang tidak meresahkan. Kita mohonkan nanti kepada Bapak Gubernur supaya masalah ini dipending dulu, distatusquokan dulu. Mudah-mudahan reklamasi ini tidak terlaksana."

Kresna Budi
Anggota Komisi I DPRD Bali

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan . . .

Denpasar (Bali Post) -
Untuk pertamakalinya pendemo tolak reklamasi Teluk Benoa ditemui anggota DPRD Bali. Tak hanya menampung aspirasi, mereka juga menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa. Alasannya, reklamasi Teluk Benoa melanggar PP 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas) dan UU No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Mereka yang menemui massa yang menggelar aksi di halaman DPRD Bali, Rabu (19/8) kemarin, adalah anggota Komisi I Ida Gede Ko-

mang Kresna Budi dan anggota Komisi II A.A. Ngurah Adhi Ardhana. Kedua anggota dewan yang sama-sama "baru" ini dengan tegas menyatakan menolak rencana *ngurug* Teluk Benoa seluas 700 hektar itu.

"Saya pribadi tentu saja menolak reklamasi," ujar Adhi Ardana disambut teriakan "tolak reklamasi" dari massa ForBALL. Politisi PDI-P ini mengatakan, dirinya bersama anggota dewan yang lain pada intinya selalu ingin melangkah berdasarkan aturan-aturan yang ada.

Hal. 19
Ketimpangan Sosial



PERNYATAAN SIKAP - Dua anggota DPRD Bali Adhi Ardhana (tengah) dan Kresna Budi menerima pernyataan sikap ForBALL yang diserahkan Wayan Gendo Suardana, Rabu (19/8) kemarin.

Bali Post/eka

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 1



sambungan - - -

Ketimpangan Sosial

Dari Hal. 1

Selama aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi maka rencana reklamasi tidak akan bisa dilakukan.

"Beberapa hal yang dilarang dalam reklamasi Teluk Benoa adalah PP No.50 Tahun 2011 tentang Ripparnas dan juga Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata," lanjutnya.

Adhi Ardhana menambahkan, iming-iming 250.000 tenaga kerja yang ditawarkan investor justru akan menimbulkan ketimpangan sosial di Bali. Pasalnya, Gubernur Bali dalam laporan pertanggungjawaban pada 2014 menyebut jumlah pengangguran di Pulau Dewata hanya 44 ribu orang.

"Yang kita takutkan apa yang terjadi, industrialisasi pariwisata juga akan mengubah pola-pola pariwisata budaya yang ada. Ujung-ujungnya adalah menyingkirkan masyarakat Bali sendiri," jelasnya.

Adhi Ardhana mengaku sudah pernah menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak reklamasi ke Kementerian Pariwisata. Pihak kementerian menyarankan agar kelanjutan Perpres No.51 Tahun 2014 yang memuluskan reklamasi ditanyakan saja kepada Presiden RI.

"Hal tersebut juga sudah

ditindaklanjuti dan mudah-mudahan selama belum dijawab oleh Bapak Presiden maka reklamasi Teluk Benoa seharusnya dalam posisi status quo, jadi tidak bisa dilaksanakan. Walaupun hal-hal yang saya berikan pandangan ini memang masih terjadi perdebatan, namun apa pun hal tersebut tetap harus kami perjuangkan," tegasnya.

Sementara itu, Kresna Budi mengatakan, pemimpin Bali sudah semestinya mendengarkan suara rakyat bila keinginan investor mereklamasi Teluk Benoa justru meresahkan masyarakat. Terlebih lagi, rencana ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Investor yang baik adalah investor yang tidak meresahkan. Kita mohonkan nanti kepada Bapak Gubernur supaya masalah ini dipending dulu, distatusquokan dulu. Mudah-mudahan reklamasi ini tidak terlaksana," ujar politisi Golkar ini.

Di akhir orasinya, Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana menyerahkan pernyataan sikap ForBALI kepada dua anggota DPRD Bali itu. Meski tidak diberikan secara formal ataupun dibungkus map, kedua anggota dewan tetap menerima dengan senang hati untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai bidang masing-masing. (kmb32)